Manajemen dan Kewirausahaan, 2024, 5(2), 125-144
E-ISSN 2774-6941
DOI Prefix 10.52682/mk.v5i2.8823

Strategi Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Kajian Literatur

Andryman[1], Sobar Sutisna[2], Anwar Kurniadi[3], Pujo Widodo[4], Kusuma[5]

[1,2,3,4,5] Manajemen Bencana, Pasca Sarjana Universitas Pertahanan, Indonesia

andrymanmutu@gmail.com

Submitted *: 11-06-2024*
Revised *: 31-07-2024*
Accepted *: 02-08-2024*

How to cite:

Andryman, Sutisna, S., Kurniadi, A., Widodo, P & Kusuma, K. (2024). Strategi Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Kajian Literatur. *Manajemen dan Kewirausahaan*. 5(2), 125-144. https://doi.org/10.52682/mk.v5i2.8823

Copyright 2024 by authors

Licensed by Commons Attribution International

License (CC BY 4.0).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

ABSTRAK

Kejadian bencana meningkat pesat selama beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data statistik BNPB, sepanjang tahun 2023 telah terjadi 3.239 kejadian bencana alam di seluruh Indonesia. Dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang salah satu fungsinya adalah pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Metode penelitian dengan melakukan literature review dengan mencari dan mengumpulkan studi pustaka melalui media elektronik menggunakan beberapa databased seperti Google Scholar dan Semantic Scholar dengan kata kunci dan pemilihan artikel untuk penelitian ini menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Berdasarkan hasil literature review, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana, yaitu: Hubungan Koordinasi baik vertikal maupun horizontal; elemen mekanisme dasar koordinasi yaitu Hierarki Manajemen, Peraturan dan Prosedur, serta Perencanaan dan Penetapan Tujuan; Komunikasi; Kompetensi dan Evaluasi. Penting untuk memastikan koordinasi yang baik antara BPBD dan lembaga/instansi terkait agar penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Katakunci: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); koordinasi; penanggulangan bencana

ABSTRACT

Disaster events have increased rapidly over the past few decades, with 3,239 natural disasters occurring throughout Indonesia in 2023 (BNPB, 2024). In terms of organizing disaster management, the local government forms a Regional Disaster Management Agency (BPBD), one of whose functions is to coordinate the implementation of disaster management activities in a planned, integrated, and comprehensive manner. The purpose of this study is to examine more deeply the factors that influence the coordination of BPBDs in organizing disaster management. The research method is to conduct a literature review by searching and collecting literature studies through electronic media using several databases such as Google Scholar and Semantic Scholar with keywords and selecting articles for this study using inclusion and exclusion criteria. Based on the results of the literature

review, several factors influence BPBD coordination in disaster management, namely: Coordination Relationships both vertical and horizontal; elements of the basic coordination mechanism, namely Management Hierarchy, Regulations and Procedures, and Planning and Goal Setting; Communication; Competence and Evaluation. It is important to ensure good coordination between BPBDs and related institutions/agencies so that disaster management can run more efficiently and effectively.

Keywords: Regional Disaster Management Agency (BPBD); coordination; disaster management

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dan berada di ekuator serta di antara tiga lempeng gempa utama dunia. Karena lokasinya di khatulistiwa, Indonesia juga memiliki iklim yang unik dengan musim hujan dan kemarau yang cukup lama. Wardyaningrum (2014) mengatakan, "kondisi geografis, demografis, sosiologis dan historis Indonesia menjadikan wilayah Indonesia rawan terhadap bencana (alam, nonalam, dan sosial)". Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015 menyatakan bahwa, "ancaman terhadap keamanan negara terdiri dari tiga kategori: militer, non militer, dan hibrida". Bencana adalah jenis ancaman non militer yang lebih berbahaya karena berdampak lebih besar dan langsung pada masyarakat. Bencana pasti menyebabkan kerusakan dan penderitaan bagi manusia, baik secara fisik maupun non-fisik, termasuk korban jiwa dan luka-luka, populasi yang harus mengungsi, kerusakan bangunan dan sarana, dan lainnya.

Bencana alam menyebabkan banyak kerugian, dan insiden bencana meningkat pesat selama beberapa dekade terakhir, tergantung pada intensitas dan frekuensi bencana, serta kerentanan dan kemampuan masyarakat (Yulianto, et al., 2021). Data yang dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari basis Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dapat ditemukan di situs web dibi.bnpb.go.id menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi 3.239 bencana alam di seluruh Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, banjir, dan puting beliung adalah bencana yang paling sering terjadi, bersama dengan bencana kecil lainnya seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor, gempa bumi, dan abrasi (BNPB, 2024). Oleh karena itu penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia menjadi penting dan sangat prioritas.

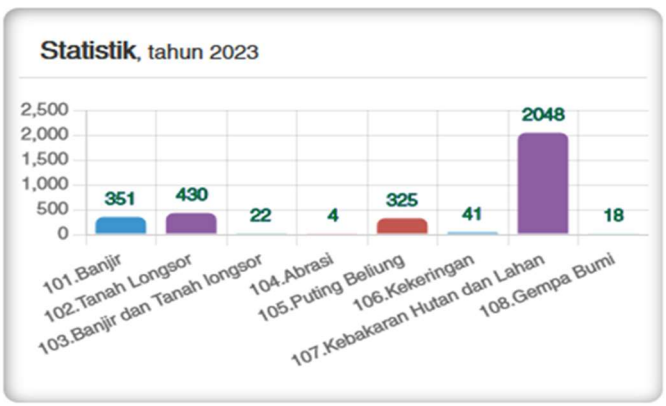

Sumber: BNPB (2024)

Gambar 1. Grafik Statistik Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenis Tahun 2023

Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan, "penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi". Indrajit (2020) mengatakan, "penanggulangan bencana merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi setiap warganya sebagai wujud keamanan insani setiap individu dalam sebuah negara". Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah "untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh untuk melindungi masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana" (Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008). Dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). "Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh" merupakan salah satu fungsi dari BPBD (UU Nomor 24 Tahun 2007). Dalam kenyataannya, koordinasi merupakan kunci dalam menangani bencana di antara individu, kelompok, dan organisasi (Bahadori, Khankeh, Zaboli, & Malmir, 2015). Menurut beberapa penelitian tentang penanggulangan bencana alam, koordinasi lembaga yang baik akan menghasilkan tujuan dan pencapaian sasaran secara efektif, mengembangkan kapasitas lokal, meningkatkan keterlibatan partisipan, dan mencegah dampak berkelanjutan (Ramdani, 2015). Sebaliknya, kurangnya koordinasi antarlembaga dapat menyebabkan pencapaian sasaran penanggulangan bencana gagal (Ramdani, 2015).

Dalam penanggulangan bencana, koordinasi merupakan hal penting, dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Menurut Muzdalifah et al. (2023) menyatakan bahwa "kajian koordinasi lembaga merupakan isu penting dalam tataran penanggulangan bencana alam guna memberikan informasi ataupun pembelajaran kepada lembaga-lembaga terkait untuk lebih meningkatkan kapasitas sumber daya maupun mengatasi kelemahan sistem yang ada." Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Koordinasi

Menurut Sukarno (2016), koordinasi adalah upaya untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi adalah proses mengatur dan menyesuaikan tindakan serta keputusan di antara berbagai aktor yang terlibat, dengan tujuan mencapai sasaran tertentu (Hustedt & Danken, 2017). Keberhasilan suatu kegiatan bergantung pada keberhasilan koordinasi di antara berbagai pihak yang terlibat. Tanpa koordinasi yang baik, perencanaan yang matang dan tujuan yang jelas tidak akan berarti banyak. Kegiatan tersebut berpotensi gagal atau mencapai hasil yang tidak maksimal karena ketidakharmonisan dan ketidakjelasan arah yang ingin dituju.

2.2. Penanggulangan Bencana

Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, "penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi". Undang-undang Penanggulangan Bencana menetapkan bahwa "pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana". Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh untuk melindungi masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana" (Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008). Penanggulangan bencana yang efektif dapat mengurangi dampak bencana dan melindungi masyarakat serta aset negara.

2.3. Badan Penanggulaan Bencana Daerah

Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Peraturan Presiden No. 1 tahun 2019). Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, "pembentukan badan penanggulangan bencana daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan salah satu fungsi BPBD adalah pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh".

3. METODE RISET

Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan literature review sebagai metode penelitian. Menurut Snyder (2019), "literature review adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam teks." Kajian literatur dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan studi pustaka melalui media elektronik menggunakan beberapa databased seperti Google Scholar dan Semantic Scholar.

Kriteria untuk menemukan kata kunci dalam penelusuran literature yaitu "Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana". Pemilihan artikel untuk penelitian ini menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Kriteria inklusi dan eksklusi artikel yang dipilih

Inklusi	Eksklusi
Jurnal yang terindeks	Jurnal tidak terindeks
Artikel penelitian dipublikasikan pada tahun 2019 - 2023	Artikel penelitian dipublikasikan sebelum tahun 2019
Artikel Bahasa Indonesia	Artikel selain Bahasa Indonesia
Artikel yang open access	Artikel yang tidak open access
Artikel yang digunakan adalah artikel penelitian (original research)	Artikel yang merupakan artikel review

Inklusi	Eksklusi
Artikel penelitian berupa studi kasus	Artikel penelitian tidak berupa studi kasus
Artikel full text	Artikel tidak full text
Topik penelitian koordinasi BPBD	Topik penelitian selain koordinasi BPBD

Sumber: Pengolahan data (2024)

Hasil analisis artikel koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana, ditemukan 5 artikel yang memenuhi kriterian inklusi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi. Artikel dikumpulkan dan disusun dalam tabel 2 yang berisi penulis, judul dan tahun artikel, daerah, terindeks dan hasil review.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Data

Untuk mengindentifikasi beberapa artikel yang menjelaskan koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana, dilakukan literatur review. Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana. Pada tabel 2 dijelaskan hasil analisis artikel yang menjadi artikel rujukan dalam mengidentifikasi koordinasi BPBD.

Tabel 2. Hasil analisis artikel yang dipilih

No.	Penulis, Judul dan Tahun	Daerah	Terindeks	Hasil Review
[1]	Bakti, V. A., & Fadlurrahman (2020): Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Google Scholar, Garuda, Sinta	Koordinasi BPBD Kabupaten Purworejo dalam penanggulangan bencana dari 3 faktor yaitu: hubungan koordinasi, mekanisme koordinasi, dan faktor pendorong koordinasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Koordinasi horizontal lebih banyak melibatkan lembaga dengan otoritas level yang sama, sedangkan koordinasi vertikal melibatkan beberapa lembaga dengan otoritas level yang berbeda. BPBD memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai komandan atau koordinator lapangan. 2) Mekanisme dasar koordinasi telah diterapkan

No.	Penulis, Judul dan Tahun	Daerah	Terindeks	Hasil Review
				secara efektif. Ini mencakup struktur manajemen yang menunjukkan koordinasi vertikal, peraturan, dan prosedur yang dipatuhi oleh BPBD, serta perencanaan dan penetapan tujuan yang dirancang untuk mengurangi efek bencana. 3) Empat faktor yang berhasil diidentifikasi berkontribusi pada keberhasilan koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana, yaitu : forum yang tersedia (baik fisik maupun nonfisik), transparansi proses pengambilan keputusan, evaluasi kegiatan secara bersama, dan dukungan desentralisasi untuk setiap pihak.
[2]	Murni, N. Y., & Alhadi, Z. (2019): Efektivitas Koordinasi Antar Stakeholders Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang	Kota Padang	Google Scholar, Garuda, Sinta	Koordinasi BPBD Kota Padang dalam penanggulangan bencana dari 3 faktor yaitu: pencapaian tujuan koordinasi, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Tujuan koordinasi untuk meringankan beban para korban tercapai dengan kerjasama antara BPBD dengan stakeholders terkait. Selain itu tujuan koordinasi terkait percepatan penanganan dapat segera dilakukan melalui peran TRC dalam

No.	Penulis, Judul dan Tahun	Daerah	Terindeks	Hasil Review
				mengidentifikasi suatu bencana. (2) Integrasi mengacu pada bagaimana penggunaan sumber daya manusia dan komunikasi yang dilakukan oleh BPBD kepada stakeholders dalam rangka penanggulangan bencana. Selain itu, integrasi juga melibatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk para korban. Dengan melibatkan semua pihak, berkomunikasi dengan baik salah satunya memamfaatkan radio telekomunikasi, dan memastikan ketersediaan sarana, BPBD dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana. (3) Adaptasi mengacu pada penyesuaian diri BPBD dengan peran yang dimiliki oleh semua stakeholders' yang terlibat. Selain itu, BPBD juga berusaha menyesuaikan peran yang dimiliki dengan kebutuhan para korban. Dengan berkolaborasi dan memahami kebutuhan korban, BPBD dapat lebih efisien dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana.
[3]	Muzdalifah, S., Mafriana, S. B., Sompa, A. T., & Attijani, M. K. (2023): Efektivitas Koordinasi Badan	Provinsi Kalimantan Selatan	Google Scholar, Garuda, Sinta	Koordinasi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penanggulangan Banjir Di Kalimantan Selatan dilakukan dalam tiga fase yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah bencana. Faktor-faktor yang

No.	Penulis, Judul dan Tahun	Daerah	Terindeks	Hasil Review
	Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Dalam Penanggulangan Banjir di Kalimantan Selatan			mempengaruhi efektivitas koordinasi menurut peneliti terdiri dari 5 aspek, yaitu: 1) Aspek Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi. Dalam aspkek komunikasi BPBD dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan secara hybrid, yakni secara online dan offline terbatas. Teknologi informasi yang digunakan berupa zoom meeting, google meet, dan whatsapp video call. 2) Aspek Kesadaran Urgensi Koordinasi Pada tahap prabencana, kesadaran instansi-instansi terkait dalam koordinasi bencana masih kurang. Beberapa lembaga mungkin tidak memiliki kewenangan langsung dalam penanggulangan bencana, tetapi memiliki kompetensi yang relevan. Ini dapat menghambat koordinasi yang efektif sebelum bencana terjadi. Pada tahap tanggap darurat, kesadaran akan pentingnya melakukan koordinasi penanggulangan bencana sudah baik. Lembaga terlibat mengadakan rapat pembagian tugas dan melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya. Ini menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dalam menghadapi situasi darurat. Pada tahap pemulihan, koordinasi dengan Satuan

No.	Penulis, Judul dan Tahun	Daerah	Terindeks	Hasil Review
				Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau kota berjalan dengan baik. Pemulihan dilakukan di berbagai sektor, termasuk pemukiman, ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Ini menunjukkan upaya untuk mengembalikan kondisi normal setelah bencana. Secara keseluruhan, penting bagi instansi-instansi terkait untuk terus meningkatkan koordinasi dan kesadaran dalam penanganan bencana pada setiap tahap. 3) Aspek Kompetensi Partisipan dalam Pengambilan Keputusan Pada tahap prabencana, peningkatan kemampuan pengambilan keputusan dan fokus pada pencegahan bencana merupakan langkah positif dalam menghadapi situasi bencana. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan penanggulangan bencana dapat lebih efektif dan responsif. Pada tahap tanggap darurat, peningkatan kompetensi dan pelaksanaan tugas yang baik merupakan langkah positif dalam penanganan bencana pada tahap tanggap darurat. Dengan kerjasama yang terus ditingkatkan, diharapkan respons terhadap bencana dapat semakin efisien dan efektif.

No.	Penulis, Judul dan Tahun	Daerah	Terindeks	Hasil Review
				Pada tahap pascabenana, pemulihan pascabencana memerlukan pengelolaan dana yang bijaksana dan fokus pada kebutuhan yang paling kritis 4) Aspek Pencapaian Kesepakatan dan Keputusan Bersama Pada tahap prabencana, koordinasi yang efektif dan kerjasama dalam mengambil keputusan pada tahap prabencana merupakan langkah positif dalam menghadapi situasi bencana. Dengan terus memperkuat komunikasi dan kesepahaman, diharapkan penanggulangan bencana dapat lebih efisien dan responsif. Pada tahap tanggap darurat, terjadi kesepakatan bersama untuk melakukan fungsi penanggulanngan sesuai dengan peran dan tanggungjawab. Pada saat pascabencana, aspek mengutamakan pemulihan kondisi masyarakat menjadi prioritas, sehingga upaya untuk solid dalam melaksanakan keputusan adalah hal yang diutamakan. 5) Aspek Feedback untuk Koordinasi Selanjutnya Dalam koordinasi penanggulangan bencana, feedback diperoleh melalui forum evaluasi yang disebut RAKERIS (Rapat Kerja

No.	Penulis, Judul dan Tahun	Daerah	Terindeks	Hasil Review
				Teknis). Pada tahap pascabencana, feedback dilakukan dengan adanya evaluasi pelaksanaan pemulihan pascabencana. Evaluasi dilakukan dengan monitoring pelaksanaan dan penggunaan dana untuk pemulihan.
[4]	Monica, C., & Siti Hazzah (2022): Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Upaya penanggulangan Pasca Bencana Banjir Di Kota Medan	Kota Medan	Google Scholar, Garuda, Sinta	Koordinasi BPBD Kota Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam penanggulangan bencana dari 4 faktor yaitu: Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, Disiplin. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kesatuan Tindakan Meskipun tidak ada rencana kerja yang disusun bersama-sama, BPBD dan Dinas PU berkoordinasi dalam penanganan bencana banjir. Setiap instansi memiliki rencana kerja dan program sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya. Kerjasama antara BPBD dan Dinas PU dalam penanganan bencana banjir memerlukan sinergi dan koordinasi yang baik untuk mencapai hasil yang optimal. 2) Komunikasi Komunikasi antara BPBD dan Dinas PU masih kurang optimal karena jumlah pertemuan yang terbatas dan tidak adanya target jumlah pertemuan koordinasi. Komunikasi hanya dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan informasi

No.	Penulis, Judul dan Tahun	Daerah	Terindeks	Hasil Review
				terkait program kegiatan pasca bencana banjir. Fungsi komando BPBD Kota Medan juga masih kurang optimal. Sehingga perlu ditingkatkan koordinasi dan fungsi komando dalam penanganan bencana untuk hasil yang lebih baik. 3) Pembagian Kerja Tidak adanya proses pembagian kerja, namun mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana koordinasi. Pada tahap pembagian kerja ini kapasitas SDM juga mempengaruhi kinerja dari kedua instansi tersebut, yang mana jumlah SDM dan juga kemampuan dari segi pengalaman masih belum optimal. Secara keseluruhan, perlu terus memperkuat koordinasi dan memperhatikan kapasitas SDM untuk meningkatkan penanganan bencana. 4) Disiplin Kedua instansi menerapkan kedisiplinan, tetapi ada yang kurang disiplin dalam ketepatan waktu proses pembangunan. Rapat pertemuan antara kedua instansi tidak memiliki jadwal khusus, padahal penting untuk membahas program kerja dalam penanggulangan pasca banjir di Kota Medan.
[5]	Sigit, F. F., & Ginting, S. (2023):	Kabupaten Karo	Google Scholar,	Koordinasi BPBD Kabupaten Karo dalam penanggulangan

No.	Penulis, Judul dan Tahun	Daerah	Terindeks	Hasil Review
	Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo Dengan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung		Garuda, Sinta	bencana terdiri dari 5 faktor yaitu: Komunikasi, Kesadaran pentingnya koordinasi, Kompetensi partisipan, Kesepakatan, komitmen, dan Insentif koordinasi, dan kontinuitas perencanaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Komunikasi Komunikasi terkait koordinasi antara BPBD dan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung masih mengalami kendala. Komunikasi yang hanya melalui grup WhatsApp atau telepon antar instansi terkait menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan informasi dan menghambat tindakan yang seharusnya dilakukan dengan cepat. 2) Kesadaran pentingnya koordinasi Koordinasi antara BPBD dan Dinas Sosial telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya koordinasi. Kegiatan penanggulangan bencana yang berulang telah memungkinkan para pelaksana untuk memahami tugas masing-masing dan mengurangi kendala di lapangan. 3) Kompetensi partisipan Kompetensi partisipan dalam penanggulangan bencana melibatkan pihak-pihak yang berwenang dan ahli di bidangnya. BPBD dan Dinas Sosial menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap

No.	Penulis, Judul dan Tahun	Daerah	Terindeks	Hasil Review
				hasil koordinasi. Kepatuhan terhadap keputusan akhir dianggap sebagai langkah terbaik dalam menjalankan kegiatan penanggulangan bencana. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 juga mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah terkait penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung. 4) Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi Dalam Penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung, BPBD dan Dinas Sosial berkolaborasi melalui Surat Keputusan Bupati, yang mengatur tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meskipun tidak ada insentif khusus untuk koordinasi, namun kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 361/178/BPBD/2016. Ini dapat digunakan dalam situasi bencana seperti ketika ada dapur umum di lokasi kejadian. 5) Kontinuitas perencanaan BPBD dan Dinas Sosial selalu memiliki rencana untuk penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung di masa depan. Perencanaan ini disesuaikan dengan

No.	Penulis, Judul dan Tahun	Daerah	Terindeks	Hasil Review
				kesepakatan yang ada dan kebutuhan di lapangan. Meskipun telah ada kesepakatan dan rencana sebelumnya, hasil kesepakatan dan rencana tersebut dapat berubah tergantung pada kondisi saat terjadinya bencana.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil literatur review yang diperoleh sebagaimana tabel 2, faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari:

a. Hubungan Koordinasi
Koordinasi memiliki dua bentuk subkategori. Pertama, koordinasi vertikal mengacu pada komunikasi antara individu atau unit dalam satu lembaga (internal) atau antar lembaga (eksternal) secara garis lurus dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kedua, koordinasi horizontal terjadi ketika komunikasi terjadi antara individu atau unit dalam lembaga yang memiliki posisi yang setara. Koordinasi horizontal dapat terjadi baik pada lembaga yang memiliki fungsi yang sama (interdisciplinary) maupun pada lembaga yang memiliki fungsi yang berbeda (interrelated). Namun, posisi (tingkatan) lembaga tersebut tidak berbeda, atau dengan kata lain, tidak mengandung hierarki (Kaynak & Tuger, 2014; Octorano, 2015). Pada artikel [1] dan [3] menunjukkan hubungan koordinasi vertikal dilakukan oleh BPBD Kabupaten/Kota secara internal dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan secara eksternal dengan instasi diatasnya, yaitu: BPBD Provinsi, BNPB, Kementerian/Lembaga dan TNI/Polri. Koordinasi horizontal BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan Organisasi Perangkat Daerah/OPD terkait yang ada dalam pemerintahan daerah. Koordinasi horizontal memang relatif sulit dilakukan, terutama pada unit atau lembaga yang kedudukannya setingkat, karena tidak memiliki hierarki otoritas yang tegas. Selain itu, permasalahan-permasalahan sering muncul dalam koordinasi horizontal karena adanya kepentingan yang berbeda dari masing-masing unit atau lembaga (Hustedt & Danken, 2017). Walaupun hubungan koordinasi dilakukan dengan instansi setingkat maupun diatasnya, BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdampak bencana, memiliki kewajiban sebagai komando atau koordinator lapangan, karena mereka yang mengerti dan mengetahui terkait daerah dan masyarakatnya.

b. Mekanisme Dasar Koordinasi
Koordinasi lembaga dapat berjalan secara efektif apabila terdapat mekanisme dasar dalam pelaksanaannya. Menurut Stoner & Freeman (1992) menyebutkan, mekanisme dasar tersebut mengandung beberapa unsur yang harus diperhatikan, di antaranya: (1) Hierarki Manajemen, (2) Peraturan dan Prosedur, dan (3) Perencanaan dan Penetapan Tujuan. Penerapan hierarki manajemen ditunjukkan pada artikel [1],

[2], [3], [4], dan [5], dimana koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan BPBD dengan unit atau lembaga yang kedudukannya setingkat ataupun diatasnya tetap mengedepankan unsur tersebut, sehingga tanggung jawab dan wewenang dapat ditetapkan dengan baik. Kesatuan tindakan, integrasi dan adaptasi semua stakeholder yang terlibat, membantu dalam memahami peran dan melaksanakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Artikel [1], [4], dan [5] menunjukkan penerapan peraturan dan prosedur dalam penanggulangan bencana dengan cara menggunakan peraturan dan prosedur yang berpedoman pada Undang-Undang Kebencanaan, Peraturan BNPB, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah. Pihak-pihak lain (Organisasi Perangkat Daerah/OPD, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) yang terlibat dalam penanggulangan bencana, melaksanakan sesuai peraturan dan prosedur tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak saat terjadinya bencana. Selain itu penerapan peraturan dan prosedur dapat dilakukan juga dengan pembentukan tim penanganan bencana yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana pekerjaan dilakukan. Selain itu, dapat dimasukkan pula kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dalam peraturan dan prosedur guna mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana. Unsur perencanaan dan penetapan tujuan ditunjukkan pada artikel [1], [2]. [3], dan [5], dimana perencanaan dan penetapan tujuan membantu semua stakeholder yang terlibat dalam koordinasi penanggulangan bencana dalam pencapaian tujuan, pencapaian kesepakatan dan keputusan bersama serta meminimalisir kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Proses perencanaan dan penetapan tujuan penanggulangan bencana juga diaktualisasikan melalui rapat koordinasi secara rutin antara BPBD sebagai koordinator dengan pihak-pihak semua pihak terkait. Perencanaan yang dibuat juga harus bersifat perencanaan yang berkelanjutan disesuaikan dengan kesepakatan dan kebutuhan di lapangan serta dapat berubah tergantung pada kondisi saat terjadinya bencana.

c. Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai koordinasi yang baik. Dengan saling bertukar informasi secara terus-menerus, perbedaan antara individu dan bagian dalam organisasi dapat diatasi. Selain itu, komunikasi yang baik memungkinkan perubahan kebijakan, penyesuaian program, dan perencanaan program di masa depan dapat dibahas secara efisien (Hasibuan, 2011). Artikel [1], [2], [3], [4], dan [5] menyoroti pentingnya komunikasi efektif dalam pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana. Memastikan adanya saluran komunikasi yang baik antara individu dan unit di dalam lembaga, serta antara lembaga dengan lembaga lainnya, merupakan kunci dalam mencapai koordinasi yang efektif. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pertemuan fisik dan nonfisik. Pertemuan fisik biasanya diadakan dalam bentuk rapat koordinasi yang terjadwal. Sementara itu, komunikasi nonfisik dapat dilakukan melalui telepon antar instansi, handphone, radio, telepon satelit dan teknologi informasi seperti email, grup WhatsApp, Zoom meeting, dan Google Meet.

d. Kompentensi

Pelaksanaan penanggulangan bencana melibatkan semua unsur dengan kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannnya, sehingga kompentensi individu maupun instansi yang terlibat sangat penting. Kompetensi

instansi dalam penanggulangan bencana mengacu pada kemampuan yang relevan dengan tugas dan peran yang harus dijalankan oleh individu di dalam suatu organisasi atau lembaga. Pada artikel [3] dan [5], menunjukkan kompetensi mempegaruhi koordinasi dalam pengambilan keputusan. Melibatkan pihak-pihak yang berwenang ahli dibidangnya baik fisik, non fisik dan psikososial, mempermudah koordinasi dalama mencapai tujuan penanggulangan bencana. Kompetensi juga dapat berupa kemampuan dukungan sarana dan prasarana dari semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

e. Evaluasi
Pada artikel [3] menunjukkan peranan evaluasi koordinasi penanggulangan bencana, feedback diperoleh melalui forum evaluasi yang disebut RAKERIS (Rapat Kerja Teknis) dan pada tahap pascabencana, feedback dilakukan dengan adanya evaluasi pelaksanaan pemulihan pascabencana yaitu dengan monitoring pelaksanaan dan penggunaan dana untuk pemulihan.

5. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

BPBD memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil literature review, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana: (1) hubungan koordinasi baik vertikal maupun horizontal; (2) elemen mekanisme dasar koordinasi yaitu Hierarki Manajemen, Peraturan dan Prosedur, serta Perencanaan dan Penetapan Tujuan; (3) komunikasi; (4) kompetensi dan (5) evaluasi. Penting untuk memastikan koordinasi yang baik antara BPBD dan lembaga/instansi terkait agar penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Koordinasi yang dilakukan BPBD juga masih memiliki kendala maupun keterbatasan dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Kendala maupun keterbatasan yang dihadapi antara lain: (1) ketidakmampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat waktu; (2) perbedaan dalam prioritas dan tujuan antar lembaga; dan (3) terbatasnya sumber daya seperti dana, personel, dan peralatan. Hal-hal tersebut menjadi kendala dalam menjalankan koordinasi yang efektif.

5.2. Saran

Saran untuk literature review selanjutnya mencakup penggunaan lebih banyak database, relevansi artikel dengan judul, dan pemilihan artikel yang lebih mutakhir. Akan jauh lebih baik apabila studi dilakukan secara *cross culture* sebagai pembanding implementasi strategi.

REFERENSI

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Data Informasi Bencana Indonesia*. https://dibi.bnpb.go.id/.

Bahadori, M., Khankeh, H. R., Zaboli, R., & Malmir, I. (2015). Coordination in Disaster: A Narrative Review. *International Journal of Medical Reviews*, 2(2), 273–281.

Bakti, V. A., & Fadlurrahman. (2020). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo. Aspirasi: *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 171-183. https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1594.

Hustedt, T. & Danken, T. (2017). Institutional Logics in Inter-Departmental Coordination: Why Actors Agree on A Joint Policy Output. *Public Administration*, 9(3), 730–743. https://doi.org/10.1111/padm.12331.

Indrajit, R. E. (2020). Filsafat Ilmu Pertahanan dan Konstelasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Kebangsaan*, 1(1), 54–63.

Kaynak, R. & Tuger, A. T. (2014). Coordination and Collaboration Functions of Disaster Coordination Centers for Humanitarian Logistics. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 109, 432–437. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.486.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Monica, C., & Nur R, S. H. (2022). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Upaya Penanggulangan Pasca Bencana Banjir Di Kota Medan. *Jurnal Professional*, 9(2), 327–334.

Murni, N. Y., & Alhadi, Z. (2019). Efektivitas Koordinasi Antar Stakeholders Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1), 61-70.

Muzdalifah, S., Mafriana, S. B., Sompa, A. T., & Attijani. (2023). Efektivitas Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Dalam Penanggulangan Banjir Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 238-249. https://doi.org/10.33506/JN.V8I2.1898.

Octorano, D. F. (2015). Pengaruh Koordinasi, Kompetensi dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Unit Layanan Pengadaan Kementerian Agama Pusat (ULP Kemenag Pusat). *Jurnal MIX*, 5(1), 108–123. https://doi.org/10.22441/jurnal_mix.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Nomor 1 Ttahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Ramdani, E. M. (2015). Koordinasi oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(3), 383–406. https://doi.org/10.31113/jia. v12i3.50.

Sigit, F. F., & Ginting, S. (2023). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo Dengan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung. *Journal of Science and Social Research*, VI (2),495–502.

Snyder, H. (2019). 'Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, pp. 333–339, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

Stoner, J. A. F. & Freeman, E. (1992). *Management (Fifth Edition)*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Sukarno, F. (2016). Koordinasi dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Nasional Kayan Mentarang di Desa Tanjung Lapang Kilometer Delapan Kabupaten Malinau. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 4(2), 217–232.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Wardyaningrum, D. (2014). Perubahan Komunikasi Masyarakat Dalam Inovasi Mitigasi Bencana di Wilayah Rawan Bencana Gunung Merapi. *Jurnal ASPIKOM*, 2(3), 179. https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i3.69

Yuliato, S., Apriyadi R. K., Aprilyanto, Winugroho, T., Ponangsera, I. S., & Wilopo. (2021). Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 180-187.